



Buletin

# Parlementaria

Nomor 994/II/II/2018 • Februari 2018



## Revisi UU MD3 PERKUAT FUNGSI LEGISLASI

TIDAK  
DIPERJUAL  
BELIKAN



9 772614 339005

# Revisi UU MD3 Perkuat Fungsi Legislasi

Ketua Badan Legislasi DPR RI Supratman Andi Agtas menjelaskan revisi Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) tidaklah semata-mata menambah kursi pimpinan dalam lembaga legislatif. Penambahan pimpinan itu hanya dinamika politik, yang menjadi inti dari revisi ini adalah penguatan fungsi legislasi, yang dibarengi badan spesifik yang melaksanakannya, yaitu Badan Legislasi.



Pimpinan dan Anggota Baleg DPR RI serta Menkumham tandatangani draf RUU MD3

“Ini soal dinamika politik saja, karena memang semangatnya bagaimana penambahan pimpinan itu bisa menimbulkan kualitas kerja bisa lebih maksimal lagi. Yang paling penting dalam perubahan Undang-Undang MD3 kali ini mengatur soal inti yang kita sepakati dengan pemerintah, adalah bagaimana menjawab tantangan fungsi legislasi,” papar Supratman usai Rapat Kerja Baleg dengan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (8/2).

Dalam pengambilan keputusan yang berlangsung hingga Kamis dini hari itu, DPR bersama dengan Pemerintah menyepakati menambah satu kursi pimpinan DPR dan

menambah tiga kursi pimpinan MPR. “Sebenarnya draf awal itu 1-1, terakhir berubah jadi 1-2, akhirnya jadi 1-3. Satu di DPR, tiga di MPR,” ungkap Supratman.

Dengan keputusan ini, pimpinan DPR akan diisi enam orang, sementara pimpinan MPR bertambah menjadi delapan orang. Adapun Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan sebagai pemenang pemilu 2014 yang selama ini tidak masuk dalam komposisi pimpinan DPR dan MPR, dipastikan mendapat satu jatah kursi di DPR dan MPR.

Dalam rapat yang sudah digelar sejak Rabu (7/2) siang secara tertutup, lalu dilanjutkan rapat kerja secara terbuka sekitar pukul 22.30 WIB,

delapan fraksi menyetujui usulan penambahan jumlah kursi pimpinan. Adapun dua fraksi, yakni Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Nasional Demokrat (NasDem) menolak usulan itu. Kesepakatan Baleg ini pun akan dibawa ke Rapat Paripurna DPR mendatang.

Namun, lanjut Supratman, keputusan ini hanya berlaku hingga tahun 2019. Setelahnya, penentuan pimpinan DPR akan ditentukan secara proporsional mekanismenya, siapa partai pemenang pemilu akan jadi Ketua DPR, dan urutan kedua sampai kelima akan jadi Wakil Ketua.

“Merefleksikan soal keterwakilan pimpinan itu menggambarkan hasil pemilu yang lalu. Sehingga berdasarkan urutan-urutan itu lah yang diputuskan menempati posisinya baik di DPR maupun MPR,” imbuh politisi F-Gerindra itu.

Dalam kesempatan yang sama, Menkumham Yasonna Laoly menilai keputusan revisi UU MD3 ini sebagai bentuk akomodasi dari asas keadilan. “Dalam tafsiran kita, ini hanya penambahan sesuai dengan urutan peserta pemilu yang berdasar perolehan suara, karena dimanapun refleksi dari hasil Pemilihan Umum, harus terefleksi dalam unsur pimpinannya. Ini mengakomodasi asas keadilan saja,” jelasnya.

Oleh sebab itu, Yasonna mengungkapkan, Pemerintah dapat menyetujui Revisi UU MD3, karena di dalamnya ada penguatan Baleg dan Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN), dimana pada periode lalu BAKN dihapus, namun sekarang baru dirasakan kepentingannya kembali.

“Penguatan Baleg supaya rancangan undang-undang bisa kita percepat, dan Baleg sebagai lembaga yang ada di DPR dapat berfungsi menjadi lebih kuat untuk menyusun rancangan undang-undang dan membahas undang-undang,” papar Yasonna. ■ (eko/sj)

# Ketua DPR Dukung Penambahan Anggaran MUI

Ketua DPR RI Bambang Soesatyo memberikan dukungan atas keinginan Majelis Ulama Indonesia (MUI) memiliki Satuan Kerja (Satker) sendiri dan mata anggaran sendiri. Selama ini anggaran MUI masih menggunakan mata anggaran dari Kementerian Agama.



Ketua DPR RI Bambang Soesatyo bertukar cenderamata dengan Ketua MUI

“Kita akan membicarakan hal ini dengan Menteri Keuangan dan saya minta agar Komisi VIII DPR mengkaji hal tersebut, agar MUI bisa ditingkatkan anggarannya,” ungkap Bamsuet panggilan akrabnya, saat melakukan kunjungan Taaruf Silaturahmi dan Tukar Pikiran dengan Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia (MUI) di Kantor MUI, Jakarta Pusat, Selasa (6/2).

“Kami Pimpinan pasti akan mendukung peningkatan anggaran MUI, MUI itu kan membina umat, apalagi mayoritas umat Islam berada di Indonesia. Ini tanggung jawab kita,” ungkapnya.

Selama ini anggaran yang diterima MUI sebesar Rp 6 miliar, sedangkan MUI membina hampir 200 juta jiwa umat Islam, tentu anggaran ini tidak sebanding dengan tugas berat MUI. Sebagaimana disampaikan Ketua Umum MUI Maruf Amin bahwa, minimal Rp 30 miliar anggaran untuk MUI, karena program dan kegiatan MUI cukup banyak.

“Kalau ada ruang untuk penambahan anggaran MUI, maka saya dorong segera dilakukan, karena ini sangat penting dalam menunjang kegiatan peningkatan moral bangsa dan ini sesuai dengan Nawacita Presiden Jokowi,” tegasnya.

Bamsuet berjanji akan membicarakan hal tersebut dengan Kementerian Keuangan, Banggar dan Komisi terkait, agar dilakukan kajian ruang penambahan anggaran atau Satker anggaran MUI berdiri sendiri. “Kalau ada ruang dan sesuai dengan perundang-undangan, maka pasti akan kita dukung. Kalaupun Satkernya tidak bisa berdiri sendiri, yang penting anggaran MUI bisa cukup,” tutup Bamsuet. ■ (sker/ss)

**PENGAWAS UMUM**  
Pimpinan DPR RI  
**WAKIL KETUA PENGARAH**  
Dra. Damayanti, M.Si (Deputi Bidang Persidangan)  
**PIMPINAN PELAKSANA**  
Y.O.I Tahapari, S.H, M.Si(Karo Pemberitaan Parlemen)  
**PIMPINAN REDAKSI**  
Drs.Mohammad Djazuli, M.Si (Kabag Media Cetak)  
**WK. PIMPINAN REDAKSI**  
Sugeng Irianto, S.Sos., M.A. (Kasubag Media Cetak),  
Ahyar Tibi, S.H (Kasubag Media Analisis),  
Nita Juwita, S.Sos (Kasubag MedSos dan Website)  
**REDAKTUR**  
Suciati, S.Sos, Sofyan Efendi  
**SEKRETARIS REDAKSI**  
Hasri Mentari, Guntur Dewanto  
**ANGGOTA REDAKSI**  
Mastur Prantono, Agung Sulistiono, SH, Rahayu Setiowati,  
Muhammad Husen, Virgianne Meiske Patuli, Devi Iriandi,  
Hendra Sunandar, Surahmat Eko, Ria Nur Mega,  
Ila Rachmayati, Mahir Pratama, Taufan Syahrulli  
**REDAKTUR FOTO**  
Eka Hindra, Iwan Armanias  
**FOTOGRAFER**  
Soepardi, Naefuroji, M. Andri Nurdiansyah,  
Jaka Nugraha, Runi Sari Budiati, Jayadi Maulana, Arief  
Rachman, R. Kresno PD Moempoeni, Azka Restu Fadillah  
**ADMINISTRASI**  
Bagus Mudjiharjanto, Luthfi Suci Nur 'Aini,  
Damar Maulana Taher  
**ALAMAT REDAKSI/TATA USAHA**  
Bagian Media Cetak & Media Sosial DPR RI  
Gedung Nusantara II Lt. 3  
Jl. Jend. Gatot Soebroto-Senayan, Jakarta  
Telp. (021) 5715348, 5715350 Fax. (021) 5715341,  
e-mail: bag\_media@dpr.go.id, www.dpr.go.id/berita



## PENERBITAN

**PIMPINAN PENERBITAN**  
Drs. Sunardi, M.M (Kabag Penerbitan)  
**PENANGGUNG JAWAB PRODUKSI**  
Mediantoro, S.E (Kasubag Produksi)  
**STAF PRODUKSI**  
Subadri, S.E, Barliansyah,  
Fathurahman, Abdul Kahfi, S. Kom,  
**DISTRIBUSI DAN SIRKULASI**  
Drs. Karyanto (Kasubag Distribusi)  
**ADMINISTRASI**  
Sjaefudin, S.Sos  
**KOORDINATOR DISTRIBUSI DAN SIRKULASI**  
Mujiyono  
**PHOTOGRAFER ART**  
Friederick Munchen  
**STAF DISTRIBUSI DAN SIRKULASI**  
Arif, Lamin, Remon,  
Yuliana Puspita, Ifan  
Telp. 021-571 5697 Fax. 021-571 5421  
Email : bag\_penerbitan@dpr.go.id

**ISI BERITA DAN MATERI FOTO  
DILUAR TANGGUNG JAWAB BAGIAN PENERBITAN**

**HUBUNGI BAGIAN PENERBITAN UNTUK PERMINTAAN  
HASIL CETAK DAN DISTRIBUSI (GRATIS)**

# Pimpinan DPR Dukung Peringatan HMN

Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan mendukung peringatan Hari Musik Nasional (HMN) yang akan digelar di Jakarta pada 3-9 Maret mendatang. HMN diperingati setiap tanggal 9 Maret yang merupakan tanggal lahir WR Soepratman, dengan ketetapan dari Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 2013.

“Ini harus kita dukung bersama-sama. Musik menjadi hal penting, karena bisa membawa misi norma-norma kehidupan yang baik dan positif di tengah era globalisasi ini,” kata Taufik usai menerima Panitia HMN yang diketuai Ali Akbar, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (6/2).

Hadir dalam acara ini, perwakilan Persatuan Arti, Penyanyi, dan Pemusik Indonesia (PAPPRI), Persatuan Artis Melayu Indonesia (PAMI), hingga insan musik keroncong dan campur sari. Tampak hadir juga puluhan musisi, seperti Hamdan ATT, Hendro Saky, Koko Thole, Timur Priyono, Jelly Tobing, Maxie Mamiri, dan lainnya.

“Saya mendorong agar peringatan ini gaungnya disiarkan ke seluruh wilayah Indonesia. Sehingga, jangan hanya seremonial saja, namun juga ada kegiatan-kegiatan seperti lomba. Kreativitas itu

dikembalikan kepada panitia,” imbuh Taufik.

Politisi F-PAN itu menambahkan, DPR juga memberikan pesan kepada para pencipta lagu untuk betul-betul bisa memberikan aspek pembelajaran, serta hal-hal yang sangat mendukung adat ketimuran dan kesantunan pada setiap karya ciptanya.

Terkait hak cipta, juga disinggung dalam pertemuan. Taufik memastikan, kini sudah ada payung hukum untuk melindungi hak cipta, yakni Undang-Undang Hak Cipta. Kendati tak dipungkiri, di UU ini sebagian besar masih menyangkut masalah aspek perfilman. Untuk industri musik hanya 25 persen. Ia juga mengingatkan kepada setiap insan musik untuk bersiap menghadapi kemajuan teknologi.

“Harus kita perhatikan juga ada kemajuan teknologi informasi yang

sangat pesat. Orang pun sekarang tinggal klik di internet, sudah bisa mendengarkan lagu. Ini tantangan zaman yang harus kita jawab bersama-sama,” pesan politisi asal dapil Jawa Tengah itu.

Sementara itu, Ketua Panitia Hari Musik Nasional Ali Akbar mengatakan, HMN merupakan peringatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah melalui Kepres Nomor 10 Tahun 2013. Ia mendorong peringatan ini benar-benar digelorkan, untuk menandai bahwa musik adalah bagian penting dari bangsa. Selain itu, bahwa musik menjadi bagian yang bisa menghasilkan nilai ekonomi dan kultural.

“Selama ini, selama empat tahun peringatan HMN kurang bergelora. Kita mendatangi DPR untuk menyampaikan masalah ini, untuk membahas benar tidak Keppres ini tentang hari musik. Jadi kita audiensi, untuk tukar pikiran hal-hal yang bisa menjadi sesuatu yang penting bagi perkembangan musik Indonesia,” jelas Ali.

Dalam pertemuan, Ali pun memaparkan sejumlah rencana peringatan HMN yang akan digelar pada 3-9 Maret mendatang di Jakarta, dengan tema Kebyar-Kebyar. Beberapa acara digelar, diantaranya expo musik, seminar, aksi peduli sosial, panggung musik di kecamatan-kecamatan, hingga penyerahan awards kepada para musisi. (g)



Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan foto bersama Panitia HMN

Foto: Arif/ind



Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah

## Orator Tradisi Para Pemimpin Indonesia

Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah mengingatkan kalau tradisi orator adalah tradisi para pemimpin Indonesia. Indonesia ini adalah negara yang lahir dalam krisis perang perundingan dan perang di tengah-tengah panggung yang bergolak, bukan panggung yang tenang.

“Itulah sebabnya agak sulit bagi orang Indonesia sebetulnya kalau pemimpinnya bukan orator. Sulit bagi orang Indonesia, karena kita tumbuh dan lahir dengan tradisi panggung,” ungkap Fahri saat menjadi narasumber di acara Bintang Orator Radio Parlemen di Lobi Nusantara II Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (5/2)

Menurut dia, pemimpin-pemimpin kita bukan hanya Bung Karno saja, kalau mendengar atau membaca dokumentasi tentang rapat-rapat BPUPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia

(PPKI), maupun Konstituante. Apalagi dalam tradisi parlementer dulu, itu orator-orator semua di dalamnya.

“Maka Indonesia tumbuh tanpa pemimpin orasi, itu kurang top. Dan juga pemimpin itu, harusnya hari-hari dia berorasi kepada bangsanya untuk meyakinkan arah dari bangsa itu. Itu yang di dalam istilah yang ditemukannya di zaman Roosevelt dulu itu,” terangnya

Roosevelt, tambah politisi dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu, adalah pemimpin Amerika Serikat yang melahirkan istilah Bullypulpit dimana

dia bisa menggunakan panggung orasi podium Presiden AS untuk meyakinkan bangsanya tentang satu arah yang besar. Roosevelt saat itu bisa meyakinkan bangsanya supaya mau bergotongroyong, ketika akan membangun infrastruktur lintas Amerika.

“Itu orasi. Pemimpin itu harus setiap hari lahir dia. Apalagi sekarang. Kalau dulu kan channel media itu sedikit, sehingga orang bisa melihat pemimpinnya melalui panggung, melalui televisi dan radio. Tapi sekarang, kita di DPR ini punya channel TV dan Radio Parlemen, yang sedang kita usahakan agar mempunyai channel khusus, sehingga di publik itu tahu ada dua channel, yakni satu yang melaksanan, satunya mengawasi (Parlemen). Itu sama-sama ditonton oleh publik nanti. Jangan cuma satu channel,” katanya lagi.

Karena itulah, Fahri Hamzah menyambut positif kegiatan Bintang Orator yang diselenggarakan oleh Biro Pemberitaan Parlemen Kesetjanaan DPR RI, dengan harapan dibuat secara rutin. Bila perlu di dalam pidatonya itu, juga digambarkan sejarah bagaimana orang Indonesia belajar pidato, dan menjelaskan bagaimana Bung Karno berlatih di depan cermin, sampai cerminnya pecah.

“Itu semua kita gambarkan, karena pusat atau salah satu medium dari heroisme baru bangsa Indonesia adalah para pemimpinnya yang orator-orator ini. Karena itu, saya mengucapkan selamat kepada yang menjadi finalis. Anda adalah orator-orator masa depan dan jangan berhenti menjadi orator,” harap anggota DPR dari daerah pemilihan Nusa Tenggara Barat (NTB) itu. ■ (skr/sc)



# Kerja Sama Pertahanan di Timur Tengah Perlu Diperluas

Ratifikasi kerja sama pertahanan RI-Arab Saudi yang kini sedang dibahas di Komisi I DPR RI perlu diperluas dengan membangun kerja sama pertahanan baru bersama negara-negara lainnya di kawasan Timur Tengah (Timgeng). Ini penting agar tak menimbulkan kecemburuan politik dan salah persepsi negara-negara Arab terhadap Indonesia.

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Hanafi Rais melontarkan pandangannya itu kepada Parleментарia usai memimpin rapat pembahasan RUU Kerja Sama Pertahanan Indonesia-Arab Saudi di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (6/2).

Kerja sama pertahanan ini harus mempertimbangkan perkembangan mutakhir di Timgeng yang sedang berebut pengaruh. Terakhir, Pemerintah Arab Saudi sedang menggalang dukungan negara-negara Timgeng untuk aksi kontra-terorisme.

Ada 41 negara yang sudah bergabung, tapi Indonesia menolak bergabung. Menurut Hanafi, itu sikap politik yang tepat bagi Indonesia sebagai yang memiliki prinsip politik luar negeri yang

bebas dan aktif. “Jangan sampai ratifikasi ini dipersepsi salah oleh negara-negara Timur Tengah yang sedang bersaing berebut pengaruh. Jangan sampai kita juga berpihak atau terbawa arus oleh pusaran konflik Timur Tengah, sehingga kita dianggap tidak netral,” jelas politisi PAN ini.

Kerja sama pertahanan dengan Saudi, sambung Hanafi, bersifat low profile. Artinya, hanya sebatas kerja sama latihan militer bersama, berbagi informasi intelijen, kerja sama kesehatan, dan bantuan bencana. Ini bukan kerja sama dalam bentuk pakta pertahanan. Untuk menghindari kesalahpahaman negara-negara Timgeng lainnya, Hanafi pun mengusulkan agar kerja sama pertahanan bisa dibangun dengan Iran, Mesir, dan



Wakil Ketua Komisi I DPR RI Hanafi Rais

negara lainnya yang dianggap strategis bagi Indonesia.

“Betul-betul ini tidak ada kerja sama militer dalam konteks pakta pertahanan. Dan Saudi sendiri pernah mengajak kita dalam aksi kontra-terorisme, tapi Indonesia menolak. Kita apresiasi itu, karena prinsip politik luar negeri kita bebas aktif. Aliansi kontra-terorisme yang dipimpin Saudi sudah menggalang 41 negara, Brunei dan Malaysia ikut serta. Perkembangan terakhir ini perlu dicermati dalam konteks kehati-hatian,” ucap Hanafi. ■(mh/sj)



Anggota Komisi II DPR RI Sutriyono

## DPR Dorong Pengawasan Penggunaan Dana Desa

Maraknya kasus korupsi yang melibatkan perangkat desa membuat prihatin Anggota Komisi II DPR RI Sutriyono. Politisi F-PKS ini mendorong pemerintah melakukan pengawasan terhadap penggunaan dana desa, mengingat masih minimnya kapasitas dan integritas perangkat pemerintahan desa.

“Ada persoalan kepala desa yang tersandung korupsi dana desa. Sebelumnya, kita sudah sampaikan dengan Menteri Desa PDTT dan Dirjen Bumdes, kita inginkan proses hukum dapat berjalan dengan baik,” ungkap Sutriyono di sela-sela Raker Komisi II dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (6/2).

Diketahui, dari hasil pantauan Indonesia Corruption Watch (ICW), kepala desa yang melakukan penyalahgunaan dana desa mencapai 112 orang dan 32 perangkat desa. Menurut

ICW, jumlah ini meningkat sejak tahun 2015, yang terjerat sebanyak 15 orang, meningkat tahun 2016 menjadi 32 orang, dan 2017 meningkat lagi menjadi 65 orang.

Politisi dari dapil Jawa Tengah III ini menyangkan banyaknya perangkat desa yang justru menjadi aktor utama dalam tindak pidana korupsi di desa. Menurutnya, kesempatan untuk menjadi pemimpin terpilih dari demokrasi secara langsung harusnya menjadi amanah.

Ia menambahkan, seharusnya penggunaan dana desa yang efisien dan akuntabel akan memberikan manfaat lebih terhadap otonomi daerah, terutama untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, pelayanan publik hingga peningkatan daya saing.

“Ini yang harus menjadi fokus. Nah, ketika demokrasi dilaksanakan secara langsung, rakyat memilih pemimpinnya, harapannya mencapai sasaran tadi,” imbuhnya.

Sutriyono juga mengakui, salah satu kendala dalam pengelolaan dana desa ialah masih minimnya pemahaman teknis dan kompetensi dari perangkat desa. Sehingga masih kesulitan dalam mengefisienkan dana desa.

“Itu tantangan kita, karena ini UU baru. Ini menjadi catatan serius bagi pemerintah, karena kalau dibiarkan akan menjadi evaluasi bagi pelaksanaan UU Desa,” sambungnya. ■(ann/st)

## Komisi IV Dorong Perbaikan Infrastruktur Kepulauan Aru

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Michael Wattimena mendorong pemerintah dalam hal ini KKP (Kementerian Kelautan dan Perikanan) untuk memperbaiki infrastruktur, serta lebih meningkatkan sarana dan prasarana di Kabupaten Kepulauan Aru, Maluku.



Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Michael Wattimena pimpin Tim Kunspek ke Maluku

Foto: Ajni/nd

“Kepulauan Aru ini memiliki kontribusi yang besar bagi negara, yakni sebagai produksi ikan tuna dan cakalang terbesar. Sebanyak 2/3 produksi tuna dan cakalang nasional ada di sini (Kepulauan Aru),” ujar Michael saat memimpin Kunjungan Spesifik Komisi IV DPR ke Kepulauan Aru,

Maluku, Rabu (7/2).

Sayangnya, lanjut Michael, potensi yang besar dari Kepulauan Aru tersebut tidak dirasakan benar oleh masyarakat sekitar yang notabene merupakan nelayan. Bahkan sebagaimana yang diakui oleh Bupati Kepulauan Aru Johan Gongga, sebanyak 28 persen masyarakat Aru masih di bawah garis

kemiskinan. Kondisi ini dinilai Michael cukup memprihatinkan.

“Ada sebuah masalah besar di kepulauan ini. Diantaranya terkait infrastruktur jalan yang kurang memadai, serta sarana dan prasarana yang masih sangat minim,” tambah politisi dari fraksi Partai Demokrat ini.

Ditambahkan Bupati Kepulauan Aru Johan Gongga, tidak jarang karena minimnya infrastruktur dan sarana prasarana membuat nelayan tidak bisa memanfaatkan dan memasarkan hasil lautnya secara maksimal. Mengingat Kabupaten Kepulauan Aru terdiri dari pulau-pulau alias pesisir.

“Terkadang karena tidak ada sarana dan prasarana menyebabkan nelayan tidak bisa memasarkan hasil tangkapannya secara maksimal untuk bisa menjangkau seluruh wilayah Aru yang cukup luas. Sehingga terkadang hasil tangkapannya sudah rusak terlebih dahulu ketika akan dipasarkan, karena tidak adanya fasilitas *cold storage*, misalnya. Oleh karena itu saya berharap agar DPR dan pemerintah pusat dapat membantu mencari solusi atas permasalahan ini,” papar Johan.

Menjawab hal tersebut, Michael berjanji akan membicarakannya dengan Menteri KKP Susi Pudjiastuti beserta jajarannya. Pasalnya apa yang diharapkan Bupati Aru tersebut sejatinya sudah terprogramkan dalam anggaran KKP, khususnya untuk program bantuan nelayan. Pihaknya akan terus mendorong pemerintah merealisasikan permintaan bupati yang notabene selama ini menjadi keluhan nelayan Kepulauan Aru. ■(ajni/sc)

# Komisi IV DPR Kunjungi Badan Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu Sidoarjo



Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Viva Yoga Mauladi memimpin Tim Kunspek ke BKIPM Surabaya

Tim Kunjungan Spesifik Komisi IV DPR RI meninjau Badan Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu (BKIPM) Surabaya di Puspa Agro, Sidoarjo, Jawa Timur. Kunjungan dimaksudkan untuk melihat kondisi Pusat Karantina Ikan terlengkap dan satu-satunya di Indonesia. Dipimpin Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Viva Yoga Mauladi, Komisi IV langsung melihat tata cara pengamanan produk-produk perikanan, baik yang akan ekspor maupun impor yang datang ke Indonesia, Selasa (6/2).

“Badan karantina ini penting artinya sebagai ketahanan pangan dan garda terdepan Indonesia dalam pengamanan produk-produk perikanan, kami ingin melihat mekanismenya seperti apa yang dilakukan Badan Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu (BKIPM) di Surabaya ini,” kata Viva.

Politisi PAN ini menuturkan pihaknya tengah merevisi UU Karantina terkait kekayaan flora maupun fauna Indonesia. Kedatangan Komisi IV DPR di BKIPM ini untuk melihat kondisi lapangan tentang karantina hewan, khususnya ikan.

UU Karantina masih belum selesai karena ada perbedaan pendapat baik dari internal kami sendiri, maupun dengan pemerintah. Namun tetap muara UU Karantina ini untuk melindungi flora dan fauna kita.

UU Karantina ini dimaksudkan sebagai proteksi flora dan fauna Indonesia dari masuknya flora-fauna asing.

“UU Karantina masih belum selesai karena ada perbedaan pendapat baik dari internal kami sendiri, maupun dengan pemerintah. Namun tetap muara UU Karantina ini untuk melindungi flora dan fauna kita. Hasil dari sini akan kami jadikan data masukan tambahan pembahasan UU ini nanti,” ungkapnya.

Sementara itu di tempat yang sama, Kepala BKIPM Kementerian Kelautan dan Perikanan Rina menambahkan, bahwa pusat karantina ikan ini untuk menampung produk ikan ekspor dan impor yang melalui Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya.

Tempat ini dibangun untuk mengurangi dwelling time peti kemas di Tanjung Perak agar lebih cepat. Lebih lanjut Rina menjelaskan, untuk produk perikanan yang akan keluar atau masuk, harus mendapat sertifikat lolos uji kesehatan dari BKIPM.

“Dan itu membutuhkan waktu dua hingga tiga hari untuk memeriksa produk yang akan diekspor maupun diimpor. Kalau dilakukan di pelabuhan akan mengganggu *traffic dwelling time* peti kemas. Karenanya, khusus produk perikanan dibawa ke sini,” ungkap Rina.

Pemeriksaan produk perikanan di BKIPM ini memberi kontribusi pemasukan sekitar Rp 11 miliar pada 2017 lalu. Apabila ditemukan produk perikanan yang tak layak, seperti berpenyakit, dokumen tidak lengkap, dan membahayakan, akan langsung diproses sesuai mekanisme yang ada dan dimusnahkan di tungku pembakaran yang ada di tempat ini.

“Kami pun juga memiliki lab yang komprehensif untuk memeriksa mikroba, bakteri, maupun virus, yang ada di produk perikanan untuk ekspor maupun impor. Dengan demikian, kami bisa melindungi masyarakat dari ancaman kesehatan produk ikan dan juga melindungi produk ikan di Indonesia,” pungkasnya. ■ (andri/s)

# Pembangunan Pintu Air dan Revitalisasi Pompa Air Demangan Surakarta Prioritas 2019



Tim Kunspek Komisi V DPR RI tinjau pintu air Demangan di Kota Surakarta

Komisi V DPR RI mengharapkan pembangunan pintu air dan revitalisasi pompa air Demangan di Surakarta, Jawa Tengah masuk dalam rencana prioritas pembangunan nasional tahun 2019.

Anggota Komisi V DPR RI Sadarestuwati mengatakan pembangunan pintu dan pompa air ini untuk mencegah terjadinya banjir di wilayah Surakarta dan sekitarnya. Menurutnya, karena di sekitar sungai Pepe ini jika curah hujan tinggi pasti banjir, maka sepanjang sungai juga perlu betonisasi, semua supaya masyarakat lingkungan sekitar sungai ini yang letaknya tergolong lebih rendah dari sungai aman dari banjir.

“Pembangunan pintu air dan revitalisasi pompa air harus dimasukkan dalam rencana prioritas pembangunan nasional pada tahun 2019. Di tahun 2019 pembangunan ini sudah bisa selesai,” katanya saat meninjau pintu air Demangan di Kota Surakarta, Jateng,

Selasa (6/2).

Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini mengatakan, anggaran yang direncanakan untuk membangun pintu air dan pompa pengendali banjir relatif tidak besar, yakni Rp 121 miliar. Dia menganggap anggaran itu bukan hal yang besar sehingga dianggap tidak perlu dilaksanakan secara multiyears, walau dengan alasan alatnya perlu dipersiapkan dan memakan banyak waktu.

Komisi V mendukung rencana ini, lanjutnya, dan pemesanan pompa air bisa dilakukan sejak awal, karena pembangunan untuk pintu air ini tidak memakan waktu yang lama.

“Mau tidak mau pembangunan pintu air dan revitalisasi pompa air ini harus segera diselesaikan, kalau tidak, maka

pintu air yang sudah berumur 110 tahun dan pompa air yang tidak berfungsi dengan baik dikhawatirkan tidak bisa menahan debit air yang tinggi, sehingga ini harus digeser supaya di sini bebas banjir,” tandasnya.

Sementara itu, Walikota Surakarta FX. Hadi Rudyatmo yang mendampingi Tim Komisi V DPR menjelaskan, desain pintu air Demangan dibuat lebih modern dengan tiga pintu dan dilengkapi enam unit mesin pompa air. Selain itu juga dilengkapi sensor pengaturan ketinggian air. Saat ini Pemkot Surakarta telah membawa desain pembangunan pintu air Demangan yang baru.

“Adanya sensor membuat salah satu pompa hidup secara otomatis pada elevasi muka air tertentu, sekaligus menghidupkan tanda suara atau lampu sebagai tanda kondisi sudah darurat,” jelas Wali FX Hadi Rudyatmo.

Pembangunan pintu air akan mulai dikerjakan April 2019 mendatang dan diproyeksikan selesai pada 2020 mendatang. Tak hanya sensor, adanya trash track di depan intake pompa juga disiapkan untuk menjaga agar sampah tidak masuk ke dalam kolam intake pompa, sekaligus berfungsi membersihkan sampah secara otomatis.

“Jadi nanti akan dilengkapi dengan tempat penimbunan sampah sementara hasil pembersihan di pintu air baru, sebelum dibuang ke tempat pembuangan akhir (TPA),” ujar dia.

Rudy berharap Komisi V DPR yang membidangi infrastruktur dan perhubungan ini dapat mengamankan anggaran untuk pembangunan tersebut. Saat ini, lanjut Rudy, proses pembangunan pintu air Demangan baru tahap pengajuan permohonan bantuan anggaran ke pemerintah pusat.

“Pintu air Demangan yang baru ini untuk membebaskan warga Solo dari banjir yang selama ini masih mengancam. Karena, selama pintu air Demangan tidak dibuat baru sejumlah kelurahan akan terus terancam banjir,” katanya. ■(as/ss)

## Komisi IV Optimis Stok Beras Nasional Aman

Ketua Komisi IV DPR RI Edhy Prabowo mengatakan, dirinya optimis stok beras nasional aman. Hal tersebut terungkap usai Komisi IV mengunjungi Gudang Bulog Duyungan di Sragen, Solo, Jawa Tengah, Selasa (6/2).



Ketua Komisi IV DPR RI Edhy Prabowo tinjau gudang Bulog Duyungan Sragen

“Stok beras nasional hingga April mencapai 20,7 juta ton. Jumlah ini sudah dikurangi akibat gagal panen (Puso), hama wereng, banjir, tanah longsor dan lain-lain. Saya optimis ketersediaan pangan nasional khususnya di Jawa Tengah masih dalam kondisi normal,” jelas Edhy.

Edhy mengungkapkan, hal ini menunjukkan apa yang disampaikan dan diragukan oleh sejumlah masyarakat tak sesuai fakta di lapangan. “Apa yang disampaikan dan diragukan oleh Kemendag dan Kemenko Perekonomian terkait beras langka dan harus impor itu tidak kita temukan di Jateng. Ternyata di sini masih normal, bahkan melebihi rata-rata,” ungkapnya.

Politisi Partai Gerindra itu menjelaskan, impor beras 500 ribu ton yang dilakukan Kemendag karena stok beras Bulog menurut Kemendag berada di bawah 1 juta ton. “Dasar mereka impor karena stok Bulog di bawah 1 juta ton, mereka tidak melihat cadangan rumah tangga, cadangan milik pengusaha, cadangan milik kelompok tani dan koperasi tani yang seharusnya juga dihitung kementerian terkait,” tuturnya.

Edhy mengatakan, salah jika dasarnya hanya stok di Bulog, karena maksimal kapasitas cadangan Bulog kalau penuh hanya delapan persen. Bulog harus mengamankan 100 persen cadangan nasional. “Bila pemerintah serius menangani pangan, maka cadangan beras nasional harus berada di angka 20 persen, kasih Bulog anggaran jangan hanya tugas saja,” pungkasnya. ■ (rnm/s)

## Proyek Rel KA Binjai-Besitang Terkendala Lahan

Pemerintah tengah mengerjakan enam proyek pembangunan proyek Rel Kereta Api (KA) Trans Sumatera di Sumatera Utara. Namun, dari enam proyek itu, jalur Binjai-Besitang yang pembangunannya sedang berlangsung sampai saat ini, masih menemui beberapa kendala, salah satunya terkait pembebasan lahan.

Demikian terungkap saat pertemuan Tim Kunspek Komisi V DPR RI dengan PT Railink, PT Kereta Api Indonesia (KAI) dan Ditjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan dalam rangka peninjauan fasilitas sarana dan

prasarana Stasiun Kereta Api Medan, Sumut.

“Yang sekarang dipermasalahkan jalur Binjai-Besitang terkait pembebasan lahan. Sehingga diperkirakan pembangunan selesai pada beberapa bulan ke depan,”

jelas Ketua Tim Kunjungan Spesifik Komisi V DPR RI ke Sumut sekaligus Wakil Ketua Komisi V DPR RI Anton Sukartono Suratno di Medan, Senin (5/2).

Keenam program perkeretaapian di Sumut itu yaitu pembangunan jalur

kereta api Binjai-Besitang, Besitang-Langsa, Rantau Prapat-Kota Pinang, Bandar Tinggi-Kuala Tanjung, Medan-Bandar Khalifa dan Bandar Khalifah-Kualanamu.

Politisi F-PD itu juga turut menyalurkan jalur sepanjang 80 km yang sudah menyerap dana APBN sebesar Rp 640 miliar tidak tepat waktu dalam pengerjaannya. “Seyogyanya jalur yang merupakan perbatasan Sumut dan Aceh itu selesai di tahun 2017,” ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Ditjen Kementerian Perhubungan, Amanah Gappa, mengungkapkan pembiayaan dalam pengerjaan proyek Binjai Besitang dibagi dalam 2 skema. Pembiayaan pertama yaitu dari APBN yakni pengerjaan crane dan jembatan serta yang kedua pengerjaan stasiun yang dialokasikan melalui Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).

“Proyek ini bersifat multiyears yang dimulai dari tahun 2017 sampai dengan tahun ini, dengan target diresmikan dan beroperasi pada bulan November 2018,” jelasnya.



Wakil Ketua Komisi V DPR RI Anton Sukartono Suratno

Foto: Titania

Terakhir ia berharap mengupayakan tercapainya Trans Sumatera yang dimulai dari Aceh, Medan sampai dengan Riau. “Ini bukan saja butuh dukungan dari segi anggaran, tapi juga dibutuhkan *political will* dari Pemda maupun Pusat, sehingga nantinya alokasi anggaran itu betul-betul terjamin ketersediannya,” imbuhnya.

Kunjungan Kerja Spesifik ini juga

turut diikuti beberapa Anggota Komisi V DPR RI ini diantaranya Anthon Sihombing (F-Golkar), Andi Iwan Darmawan (F-Gerindra), Subarna (F-Gerindra), Bahrum Daido (F-PD), Abdul Latief Hanafiah (F-PKB), Mahfudz Abdurrahman (F- PKS), Sahat Silaban (F-Nasdem), dan Syarif Abdullah (F-Nasdem). ■ (tra/sj)

## Hakim Agung Sebaiknya Tak Dibatasi Usia

Para hakim agung yang bekerja di Mahkamah Agung (MA) sebaiknya tak dibatasi usia. Apalagi bagi hakim yang sangat produktif dan profesional sangat dibutuhkan keberadaannya untuk menunjang kinerja MA. Saat ini ada dua Hakim Agung yang akan segera memasuki purna bakti.

**D**ua hakim yang segera purna bakti itu adalah Artidjo Alkosal dan Gayus Lumbun. Khusus sosok hakim MA Artidjo, Komisi III sangat menyalurkan ia harus memasuki purna bakti. Hakim yang sangat produktif dan profesional ini, sangat dibutuhkan di lingkungan MA. Saat yang sama MA juga sedang membutuhkan enam tambahan hakim agung lagi.

“Di RUU Jabatan Hakim yang sedang dibahas, mestinya tak ada lagi batasan usia bagi hakim agung,” kata Anggota Komisi III Syarifuddin Suding di Gedung MA, Jakarta, saat mengikuti rapat konsultasi dengan

Pimpinan MA, Senin (5/2). Suding menyerukan, hendaknya tak ada polemik soal batas usia seorang Hakim Agung.

“Pak Artidjo sangat dibutuhkan di MA ini. Karena ada batasan usia, dia harus memasuki purna bakti. Padahal, saat yang sama MA sedang membutuhkan enam hakim agung tambahan. Kita sangat realistis para hakim agung yang produktif, mestinya bisa dipertahankan,” harap Suding yang juga politisi Partai Hanura itu. Seperti diketahui regulasi menyangkut batas usia hakim agung sempat mengalami banyak perubahan, dari 67 tahun menjadi 70 tahun. Kini, wacana batas usia itu akan diturunkan lagi hingga 65 tahun. ■ (mh/sc)



Anggota Komisi III DPR RI Syarifuddin Suding

Foto: Dwih/ed



Foto: Olfije

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Herman Khaeron pimpin Tim Kunspek tinjau operation room Tangguh LNG

## Tangguh LNG Tingkatkan Lifting Gas Nasional

Komisi VII DPR RI mendorong upaya Tangguh LNG dalam meningkatkan lifting gas nasional antara lain dengan penambahan pembangunan satu kilang gas alam cair (liquified natural gas/LNG) baru yaitu Train 3. Hal tersebut diungkapkan Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Herman Khaeron usai melakukan Kunjungan Kerja Spesifik ke Tangguh LNG di Teluk Bintuni, Papua Barat, Kamis (1/2).

Politisi Demokrat ini menyatakan banyak aspek yang harus dilihat terkait fungsi pengawasan dalam Kunspek Komisi VII DPR ke Tangguh LNG. Antara lain masalah terkait rencana pembangunan Train

3 yang *Plan Of Development* (POD) sudah disetujui dan *cost recovery*-nya juga disetujui dan akan dibangun dalam 2 tahap, kebutuhan anggaran sekitar 8 miliar USD.

“Kita ingin tahu bahwa *Plan Of*

*Development Train 3* yang mereka kerjakan sesuai atau tidak. Dari pantauan Tim Kunspek Komisi VII saat ini masih *on progress* sekitar 30-35 persen fisik dan non fisik. Pembangunan kilang baru yang sedang dikerjakan menjadikan kekuatan baru dalam penambahan dan peningkatan *lifting* gas nasional, saya kira ini akan besar sekali,” imbuh Herman.

Herman juga mengapresiasi upaya Tangguh LNG dengan melakukan pengembangan terhadap sumur-sumur baru. Dirinya dan Anggota Tim Kunspek Komisi VII juga

menyempatkan mengecek jumlah sumur baru yang sedang dikembangkan.

“Terkait dengan target pencapaian yang sudah dicanangkan Rencana Kerja Tangguh LNG tahun 2017 memang ada target yang tidak tercapai. Dari target 117 kargo hanya terpenuhi 110 kargo sehingga apa yang menjadi kendala dalam target capaian tersebut harus dilihat dari berbagai aspek. Apakah terkait dengan regulasi, atau terkait masalah teknik, ataukah terkait dengan soal-soal lainnya,” jelas Herman.

Sementara nilai manfaat lainnya kehadiran Tangguh LNG salah satunya dari serapan tenaga kerja lokal. Dari pantauan Tim Kunspek Komisi VII di lapangan sudah hampir seluruhnya merupakan tenaga kerja asli Indonesia. Menurut pihak Tangguh LNG sudah 55 persen mengakomodir tenaga-tenaga kerja asal Papua, pungkaskan Herman Khaeron.

Director of Government & External Interface Management - Tangguh LNG Expansion Project, Ngurah Kresnawan yang mendampingi kunjungan tersebut mengungkapkan bahwa kedatangan Komisi VII DPR RI melakukan kunjungan spesifik ke Tangguh LNG untuk melihat lebih dekat fasilitas produksi dan memantau pekerjaan pembangunan proyek Kongkang Train 3.

“DPR RI menjalankan fungsi pengawasan di sektor migas sebagai salah satu sektor strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, peningkatan devisa negara dan kesejahteraan rakyat. Tangguh LNG merupakan suatu pengembangan unitisasi dari enam lapangan gas terunitisasi yang terletak di wilayah Kontrak Kerja Sama (KKS) Wiriagar, Berau dan Muturi di Teluk Bintuni, Papua Barat,” paparnya.

Ikut juga mendampingi kunjungan Wakil Kepala SKK Migas, Sukandar. Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII DPR RI ke Tangguh LNG Teluk Bintuni, Papua Barat dipimpin Wakil Ketua Herman Khaeron dan diikuti oleh antara lain Bara Krishna Hasibuan, Kurtubi, Ivan Doly Gultom, Peggi Patrisia Pattipi dan Melda Addriani. ■ (oji/sc)

## BUMN Lebih Baik Ditutup Daripada Dijual

Salah satu fungsi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) adalah sebagai stabilisator harga-harga yang ada di pasar. Namun, jika ada beberapa BUMN yang tidak maksimal dalam melakukan usaha produksi atau bahkan terlilit hutang, maka hal ini tentu akan sulit menjual hasil produksi di bawah harga pasar sebagai upaya untuk menstabilkan.

Hal itu diungkapkan Bambang Haryo Soekartono saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VI DPR RI dengan Deputi Bidang Restrukturisasi dan Pengembangan Kementerian BUMN, Dirut PT Pengelola Aset, Dirut PT Iglis, Dirut PT Merpati Nusantara, PT Penas, dan PT Kertas Kraft Aceh (KKA) di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (6/2).

“Saya agak prihatin dengan kondisi perusahaan-perusahaan yang ada, seperti pabrik KKA ini. Jadi memang mungkin pabrik KKA punya utang Rp 900 sekian miliar. Kalau kita lihat utang ini cukup besar. Apalagi listriknya tidak bekerja sama lagi dengan PLN karena kondisi produktivitasnya terus menurun,” ungkap politisi Gerindra ini.

Ia menyarankan, untuk BUMN yang tidak bisa lagi diselamatkan lebih baik ditutup dan tidak dijual. “Fungsi BUMN kan begitu, menstabilkan pasar baik dari sisi mutu, jumlah dan rupiahnya. Ini kalau sudah tidak mungkin ya lebih baik kenapa enggak BUMN ini ditutup. Ditutup ya, tidak dijual karna dijual menurut saya kurang bagus,” sarannya.

Dalam kesempatan tersebut, ia juga memberikan tanggapan mengenai revitalisasi produksi yang akan dilakukan PT KKA sebanyak 135 ribu ton per tahun yang terpasang dengan kapasitas produksi yang hanya 100 ribu ton per tahun.

“Kenapa enggak sekalian merivitalisasi sesuai dengan kapasitas produksinya menjadi 400 ribu ton per tahun. Apakah *market* bapak ini tidak bisa memaksimalkan sinergi dengan BUMN yang lain maupun sinergi dengan target yang dilakukan pemerintah saat ini. Dimana kita mengalami peningkatan pembangunan infrastruktur dari 300 Triliun menjadi 400 Triliun. Tentu hal ini membutuhkan banyak kertas dan ini menjadi peluang untuk target pasar,” pungkaskan pria dari dapil Jawa Timur I ini. ■ (mhr/sc)



Anggota Komisi VI DPR RI, Bambang Haryo Soekartono

www.ningradji

# PLTB Sidrap, Upaya Indonesia Kurangi Emisi Karbon

Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) Sidrap, merupakan pembangkit tenaga angin pertama di Indonesia yang ditargetkan akan beroperasi pada akhir Februari ini. Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Satya Widya Yudha mengatakan, PLTB yang akan segera diresmikan Presiden Joko Widodo itu merupakan wujud komitmen Indonesia mengurangi emisi karbon.



Foto: Almar

Tim Kunspek Komisi VII DPR di pimpin Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Satya Yudha meninjau Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) Sidrap di Sulsel

“Pengembangan Energi Baru dan Terbarukan (EBT) merupakan suatu langkah yang kita dorong dalam rangka memenuhi perjanjian internasional (Paris Agreement) yang telah kita ratifikasi, yaitu penurunan emisi karbon hingga 29 persen pada tahun 2030,” ungkap Satya di lokasi proyek PLTB Sidrap, Kecamatan Watang

Pulu, Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan, Kamis (1/2).

Ia menuturkan, beroperasinya PLTB adalah langkah yang sangat baik untuk pengembangan EBT sebagai sumber energi utama di masa depan menuju ekonomi rendah karbon. Mengingat, Indonesia memiliki potensi besar EBT, namun belum dimaksimalkan dengan

baik.

Politisi F-Golkar ini menambahkan, perlu strategi dan kebijakan yang lebih progresif untuk menggantikan penggunaan energi fosil ke energi yang rendah karbon. Salah satunya dengan memperhatikan *externality costs* dari bahan bakar fosil.

Menurutnya, kebijakan harga bahan bakar fosil saat ini tidak memperhatikan dampak kerusakan lingkungan sehingga tidak ada perhitungan *externality cost*. Kedepan, ia akan mendorong faktor externalities itu dimasukkan, sehingga bisa berkompetisi dengan bahan bakar terbarukan.

“Kita selalu mengatakan harga batu bara (fossil fuel) lebih murah, tetapi kita tidak pernah memperhitungkan *externality cost*. Paling penting *externality cost* harus ada dalam tatanan kebijakan *carbon pricing*. Perlu ada komitmen dari pemerintah terkait hal ini, supaya kompetitif,” sambungnya.

Satya menambahkan, pemerintah harus mulai memikirkan ekspansi pengembangan EBT. Tidak hanya tenaga angin, tetapi juga arus laut, matahari dan panas bumi. “Bahkan, tenaga nuklir juga memungkinkan di Indonesia,” imbuh politisi dari dapil Jatim IX itu.

PLTB Sidrap merupakan salah satu megaprojek 35.000 Mega watt (MW) yang digarap oleh investor asal Amerika Serikat, UPC Renewables bekerja sama dengan PT Binatek Energi Terbarukan. Dengan memiliki 30 Wind Turbin Generator (WTG) atau kincir angin, pembangkit tenaga angin yang telah menelan investasi sebesar 150 juta dollar AS tersebut akan menghasilkan listrik sebesar 75 MW. ■ (ann/sj)

## Komisi VII Tindaklanjuti Laporan Gubernur Babel

Ketua Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII DPR RI Nawafie Saleh menuturkan, pihaknya meninjau kawasan tambang PT Timah di Aik Rotan, Desa Sukamandi, Kecamatan Damar, Belitung Timur (Belitim) guna menindaklanjuti pertemuan dengan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Erzaldi Rosman Djohan pada 24 Januari 2018 lalu.

Dalam pertemuan pada 24 Januari itu, Gubernur Babel menyampaikan sejumlah persoalan terkait dengan kegiatan penambangan timah di wilayahnya. Salah satu pokok pembicaraan adalah wilayah usaha pertambangan eks PT Kobatin dan luasan lahan kritis akibat aktivitas pertambangan timah yang mencapai 307.557 hektar yang setara dengan setara dengan 18,36 persen dari luas daratan Babel seluas 1.675.240,51 hektar. Luasnya lahan kritis akibat tambang tersebut



Tim Kunspek Komisi VII DPR meninjau kawasan tambang PT Timah di Aik Rotan, Belitang Timur

Foto: Andri

Politisi F-PG itu juga menyampaikan, pada pertemuan itu dibahas sejumlah perkembangan meliputi persoalan bursa timah yang dinilai masih merugikan bagi daerah dan PT. Timah, kewajiban pasca tambang, hingga penertiban tambang ilegal.

“Gubernur meminta beberapa pertimbangan dari pemerintah pusat, melalui Komisi VII DPR untuk membantu menyelamatkan wilayah ini, yang katanya sedang menuju daerah wisata nantinya. Sebab kalau dilihat aspek kelautan, seperti pantai yang panjang, ini memiliki potensi yang baik dari sisi pariwisata. Ini yang diharapkan Gubernur,” ucapnya.

Komisi VII DPR RI akan melihat semua praktik pertambangan oleh perusahaan swasta dari sisi pengelolaan lingkungannya, dan mendukung upaya penertiban praktik tambang yang tak sesuai ketentuan.

“Di sini ada perusahaan timah yang legal dan yang ilegal. Yang ilegal ini yang jadi perhatian pemerintah daerah juga Komisi VII DPR, dan harus mendapat dukungan dari pemerintah pusat,” pungkas politisi asal dapil Jawa Barat itu. ■ (man/sj)

merupakan salah satu pemicu musibah banjir.

“Gubernur Babel melaporkan bahwa kondisi lingkungan di Babel yang rusak akibat banyaknya penambang yang

tidak bertanggung jawab serta aktivitas penambangan ilegal, akibatnya timbul banjir dan kerusakan alam di sini. Itu yang disampaikan ke kami,” kata Nawafie, di Babel, Kamis (1/2).

sudut pandang keekonomian,” ujar Dede.

Politisi dari Fraksi Partai Demokrat ini mengatakan, jika memang idealnya pelayanan kesehatan dilihat dari sisi sosial maka harus ada *reward and punishment*. “Ketika ini dilihat dari sisi sosial maka harus ada *reward and punishment*. Perlu diberikan *reward* bagi yang melayani peserta BPJS dengan baik, atau sebut saja rumah sakit dan dokter yang mengerjakan tugas dengan baik. Dan memberikan *punishment* bagi mereka yang nakal,” papar Dede.

Selain itu, Dede mengungkapkan, dari pihak PERSI menyampaikan persoalan angka pelayanan yang selama ini dikerjakan oleh rumah sakit tidak sesuai dengan keekonomian. Dia mengatakan Komisi IX akan melihat dan menganalisa apakah ada yang salah, baik dari sudut pandang persepsi atau sistem yang selama ini dijalankan, persoalan ini masih menjadi bahan kajian bersama.

“Kita akan masih terus membahas malam ini nanti tentang keuangannya. Sampai kita menemukan satu resolusi kesimpulan bersama apakah yang harus diperbaiki layanannya kah, undang-undangnya kah, atau profesinya,” papar Dede. ■ (eko/sj)

## Komisi IX Himpun Masukan Soal Pelayanan JKN

Komisi IX DPR RI menyelenggarakan seminar guna menghimpun masukan dari para pelaku pelayanan kesehatan. Seminar ini bertajuk ‘Strategi Keberlanjutan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan Peningkatan Kualitas Pelayanan bagi Peserta JKN’. Ketua Komisi IX DPR RI Dede Yusuf Macan Efendi menyampaikan seminar ini diharapkan bisa menemukan resolusi kesimpulan bersama guna peningkatan kualitas pelayanan JKN.



Ketua Komisi IX DPR RI Dede Yusuf Macan Efendi

Foto: Angka

“Seminar ini sangat baik sekali karena menggabungkan dari berbagai stakeholder yang menyampaikan sudut pandangnya masing-masing,” jelas Dede di salah satu hotel di Slipi, Jakarta, Senin (5/2) malam. Seminar ini melibatkan peserta dari Persatuan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI), Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Dirut BPJS Kesehatan, dan Ketua Dewas BPJS Kesehatan.

Dia mengatakan kepada para pelaku pelayanan kesehatan yang menjadi peserta seminar, sebenarnya DPR mengharapkan agar pelayanan kesehatan harus dilihat dari sisi sosialnya. “Saya bisa melihat masing-masing masih melihat pelayanan kesehatan ini dari sudut pandang industri, masih dari

# Perlu Upaya Bersama Redam Kekerasan Perempuan dan Anak

Tim Komisi VIII DPR mendapat laporan bahwa di Provinsi Kepulauan Riau telah terjadi 516 kasus kekerasan dan 127 kasus seksualitas selama tahun 2017. Ironisnya, di awal tahun 2018 muncul kasus pedofil di Kabupaten Karimun. Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI yang juga Ketua Tim Panja RUU Penghapusan Kekerasan Seksual Noor Achmad mengatakan, perlu upaya bersama untuk meredam kekerasan kepada perempuan dan anak.



Foto: Eka Hanura

Wakil Ketua/Ketua Tim Kunker Panja Komisi VIII DPR Noor Achmad didampingi Sekda Prov. Kepri dan Irwasda Polda Kepri Heri Pranoto saat rapat pembahasan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual di Gedung Graha Kepri, Batam

“Perlu upaya bersama melakukan pencegahan, agar kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kepri bisa diredam. Peran agama, orang tua dan lingkungan yang baik menjadi sangat penting, agar makin tahun tidak lagi mengalami peningkatan,” jelas Noor saat pertemuan dengan Sekda Pemprov Kepri Arif Fadhillah beserta jajaran di Gedung

Graha Kepri, Batam, Jum’at (2/2).

Politisi F-PG itu menjelaskan, DPR tengah merancang RUU Penghapusan Kekerasan Seksual yang akan memberi efek jera pelaku pelecehan. Saat ini, rancangan telah sampai ke naskah akademik yang kemudian akan disusul dengan penyusunan pasal per pasal, yang juga disesuaikan dengan usulan Komnas

Perlindungan Perempuan.

Noor berharap, upaya bersama lintas sektor sangat diperlukan guna menekan tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Meski diakui Noor, satu sisi sudah ada peraturan sejenis yang sebelumnya telah mengatur masalah yang sama. Sebut saja UU KDRT, KUHP pasal Kejahatan Terhadap Kesusilaan, hingga Peraturan Pemerintah tentang Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan dan lainnya.

Politisi asal dapil Jawa Tengah itu menambahkan, kunjungan kerja spesifik ke Pemprov Kepri ini untuk mengumpulkan masukan terkait RUU PKS. Masukan itu nantinya akan dijadikan pertimbangan dalam pembentukan UU yang baru bagi pelaku pelecehan hingga korban. “Masukan-masukan dalam pertemuan ini, akan menjadi tambahan dalam pembahasan RUU PKS,” imbuh Noor.

Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Irwasda Polda Kepri Heri Pranoto berharap, korban kekerasan seksualitas mendapatkan perlindungan maksimal. Polda sebagai penyidik juga meminta pihaknya jangan dibuat rancu karena aturan yang cukup banyak.

“Setidaknya ada *Lex Specialis*, bila RUU Penghapusan Kekerasan Seksual ini lahir dengan menekankan pentingnya perlindungan atas korban,” ujarnya.

Kunjungan Kerja Spesifik Panja RUU PKS ini juga diikuti oleh beberapa Anggota Komisi VIII DPR diantaranya Iskan Qolba Lubis (F-PKS), Itet Tridjaja (F-PDI Perjuangan), Zulfadhli (F-PG), Ruskati Ali Baal (F-Gerindra), Syofwatillah Mohzaib (F-PD), M. Iqbal (F-PKS), Try Murni (F-Nasdem), dan Samsuddin Siregar (F-Hanura). ■ (hr/s)

## Pusat Pendidikan Vokasi Perlu Dihidupkan Kembali

Ketua Komisi X DPR RI Djoko Udjianto menegaskan bahwa di dalam meningkatkan mutu standar pendidikan berstandar nasional masih banyak kekurangan-kekurangan yang harus segera diperbaiki, seperti sarana dan prasarana yang belum memadai, kualitas SDM terutama dosen yang kurang, serta kurikulumnya. Dia berharap Kemenristekdikti mau duduk bersama, menerima masukan-masukan bagaimana sebaiknya standar nasional pendidikan tinggi ini.

Dalam pertemuan Komisi X DPR dengan Kopertis Wilayah VIII di Denpasar Bali, Kamis (1/2), Djoko menyampaikan bahwa standar pendidikan vokasi harus menjadi perhatian, karena selama ini pendidikan vokasi belum ada standarnya. “Kita perlu menghidupkan kembali pusat pendidikan vokasi, selama ini pendidikan vokasi sering menghadapi kendala karena belum adanya standar pendidikannya,” ungkap Djoko.

“Mestinya orang yang lulus dari pendidikan vokasi, adalah orang yang siap pakai. Tetapi sekarang seperti tidak ada



Ketua Komisi X DPR RI Djoko Udjianto saat memimpin pertemuan dengan Kemenristekdikti

Foto: Singgih

bedanya dengan pendidikan di universitas. Kekurangan dana untuk riset dan praktek merupakan salah satu kendalanya,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Djoko menyampaikan bahwa pendidikan vokasi seharusnya bobotnya lebih pada praktek bukan pada teori. Jangan sampai lulusan vokasi hanya bisa berteori namun tidak bisa mempraktekannya. “Kita akan menindaklanjuti temuan dan aspirasi dari daerah ini, agar kita bisa menentukan arah standar pendidikan tinggi di Indonesia dengan baik,” tegasnya.

Sebagaimana diketahui bahwa, peringkat Indonesia dalam mengembangkan vokasi di era global dan persaingan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA), Indonesia mendapat peringkat 87 dari 127 negara, Malaysia mendapat peringkat 37 dan Thailand peringkat 47. ■ (skr/s)

## RPL dan Kampus Belum Terakreditasi Disorot Panja

Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) dan kampus yang belum terakreditasi menjadi pembahasan Panitia Kerja (Panja) Evaluasi Pendidikan Tinggi (Dikti) Komisi X DPR RI dengan pimpinan kampus di lingkungan Kopertis Wilayah X dan Perguruan Tinggi Negeri (PTN) di Padang, Sumatera Barat (Sumbar), Jum’at (2/2).

**K**etua Tim Panja Evaluasi Dikti sekaligus Wakil Ketua Komisi X DPR RI Ferdiansyah mengatakan, pihaknya ingin mengkaji ulang rencana strategi dan program Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti).

“Terkait dengan Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL). Dalam hal ini, RPL diarahkan untuk digunakan untuk kampus yang memiliki kekurangan dosen,” imbuh politisi F-PG itu.

Ferdi menambahkan, hal lain yang menjadi pembicaraan terkait masih kurangnya kerja sama antara perguruan tinggi dan industri. Dalam hal ini akan diarahkan agar industri mendukung perkembangan pendidikan tinggi dan sebaliknya. Termasuk masih lemahnya inovasi dan karya paten di perguruan tinggi.

Selain itu, lanjut Ferdi, dibahas juga masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam pendidikan tinggi. Sebagai gambaran, dari 24 juta jiwa usia pantas kuliah dari 18 hingga 24 tahun, hanya 7 juta jiwa yang kuliah tersebar di S1, S2 dan S3. Artinya masih ada persoalan yang mendasar, yakni sulitnya masyarakat

mengenyam pendidikan tinggi.

Pembahasan juga berlanjut pada isu masih adanya kampus yang belum terakreditasi. Lalu, kualitas pembelajaran mahasiswa dan upaya meningkatkan prestasi serta potensi usaha setelah lulus.

Sementara itu Koordinator Kopertis Wilayah X Herri berharap aspirasi dari pimpinan PTS tersebut dapat dibahas dan segera diupayakan solusinya. Sebab, jelasnya, dukungan dari DPR RI ini akan membantu penguatan kampus di lingkungan Kopertis Wilayah X seperti penambahan beasiswa bidikmisi di kampus swasta diharapkan dapat diwujudkan. ■ (im/s)



Wakil Ketua Komisi X DPR RI Ferdiansyah

Foto: Ivan Armanias

# Perguruan Tinggi Kalteng Diminta Kejar Target Akreditasi

Ketua Tim Kunjungan Spesifik Panja Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) Sutan Adi Hendra meminta perguruan tinggi yang ada di Kalteng kejar akreditasi program studi dan borang institusinya.



Wakil Ketua Komisi X Sutan Adi Hendra menerima Plakat dari Rektor Universitas Palangkaraya

“Akreditasi itu tuntutan regulasi yang tidak bisa ditawar-tawar lagi, masyarakat pun memiliki harapan yang besar terhadap mutu perguruan tinggi,” tegasnya di sela-sela pertemuan dengan Perguruan Tinggi se-Kalimantan Tengah, di Universitas Palangka Raya, Kamis (1/2).

Untuk itu, SAH, sapaan akrabnya, meminta perguruan tinggi di Kalimantan Tengah untuk memperbaiki proses pembelajaran yang ada saat ini. Pasalnya itu satu point penting untuk menjadikan universitas sesuai Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti).

“Proses pembelajaran menjadi penting dalam penilaian akreditasi di tiap prodi dan institusi kampus, maka saya harap ini bisa terus diperbaiki,” ungkap politisi F-Gerindra itu.

Dijelaskan SAH, saat ini akreditasi perguruan tinggi merupakan cerminan kualitas pembelajaran yang diselenggarakan perguruan tinggi secara mutlak. Bahkan akreditasi telah menjadi pra syarat dalam berbagai aspek kebijakan yang lain, seperti syarat beasiswa, penelitian, lulusan hingga program kerja sama, semuanya mewajibkan akreditasi minimal B di tiap prodi.

“Akreditasi itu cerminan proses

pembelajaran, makin bagus akreditasi suatu prodi, akan makin baik pula proses pembelajarannya, baik sarana, dosen hingga mutu dari prodi dan institusi, maka ini harus terus dikejar,” jelasnya.

Terlebih, lanjut SAH, DPR telah memberi dukungan yang cukup memadai dalam hal akreditasi perguruan tinggi ini, baik berupa regulasi maupun dukungan APBN pendidikan.

“Sehingga diharapkan akan ada percepatan akreditasi tiap perguruan tinggi, baik pembelajaran, tata kelola dan tri darma perguruan tinggi,” tandas politisi asal dapil Jambi itu. ■ (rmm/ss)

# Pertumbuhan Ekonomi Harus Dibarengi Kesejahteraan Masyarakat

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Marwan Cik Asan mengatakan, pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Tengah pada tahun 2016 dan 2017 mencapai angka 7 persen. Capaian ini bahkan jauh di atas pertumbuhan ekonomi nasional. Namun, pertumbuhan ekonomi yang tinggi ini belum berdampak secara signifikan pada kesejahteraan masyarakat Sulteng.



Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Marwan Cik Asan

Demikian diungkapkan Marwan saat pertemuan antara Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XI DPR RI dengan Sekda Provinsi Sulawesi Tengah, Kakanwil BI Provinsi Sulawesi Tengah, dan Kakanwil BPS Provinsi Sulawesi Tengah di Palu,

Sulteng, Jumat (2/2).

“Kita lihat bahwa tingkat kemiskinannya masih 14 persen. Selain itu, terjadi peningkatan pada pengangguran terbuka. Artinya kita melihat bahwa pertumbuhan yang positif ini perlu didorong kualitasnya oleh Pemerintah

Sulteng,” jelas Marwan.

Selain itu, masih kata Marwan, pertumbuhan ini lebih ditopang oleh sektor pertambangan terutama nikel dan gas di Banggai, sehingga daerah lain belum merasakan dampak dari pertumbuhan ekonomi ini. Untuk itu, ia menginginkan kedepannya Pemprov Sulteng untuk mendorong agar seluruh akselerasi pergerakan industri pertambangan ini lebih banyak melibatkan masyarakat daerah.

“Dan juga jangan selalu bergantung kepada industri tambang, karena Sulawesi Tengah ini mempunyai hasil laut dan perkebunan. Walaupun untuk saat ini hanya bisa menghasilkan bahan baku,” imbuh politisi F-PD itu.

Marwan yakin, dalam jangka panjang Sulteng sudah bisa memproduksi hasil perkebunan dan perikanan, kendati

saat ini hanya bisa menghasilkan bahan baku, dan belum melakukan industri pengolahan. “Jika sudah memproduksi nilai ekonominya bisa jauh lebih maju lagi. Agar nantinya tidak hanya bergantung terhadap hasil tambang saja,” tambahnya.

Politisi asal dapil Lampung itu berharap pergerakan sektor pertambangan terutama di Morowali dan Banggai bisa langsung dirasakan oleh masyarakat. Bukan pada

saat sudah menghasilkan saja, tetapi pada saat proses *set up* agar melibatkan banyak masyarakat. Marwan mengindikasikan, masih banyaknya tenaga kerja asing yang digunakan dalam proses pendirian.

“Dalam proses pendirian tambang ini, kita ingin keterlibatan masyarakat lokal untuk lebih banyak dan lebih produktif untuk mengurangi angka pengangguran dalam jangka pendek. Dalam jangka

panjang, selain mengembangkan sektor pertambangan, kita meminta supaya pemerintah daerah memikirkan untuk keberlanjutan pertumbuhan ini jangan seperti daerah lain, setelah tambangnya habis, ekonominya mundur karena tidak disiapkan strategi-strategi jangka panjang untuk menjaga pertumbuhan ekonomi,” tutup Marwan. ■ *(azk/sj)*

## DPR Dorong Percepatan Ekonomi Bengkulu

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Rai Wijaya mengatakan, perekonomian di Provinsi Bengkulu perlu ditingkatkan dan menjadi perhatian khusus agar pertumbuhan ekonomi tidak menurun. Ada beberapa hal yang dapat dilakukan Provinsi Bengkulu untuk memacu pertumbuhan ekonomi seperti keberadaan beras Bengkulu yang saat ini masih dikelola oleh pihak luar.

“Semestinya dengan potensi yang diketahui cukup besar itu, beras bisa diolah di Bengkulu sendiri. Sehingga keuntungan pengadaan lokal, bisa memenuhi kebutuhan dasar masyarakat di wilayah Provinsi Bengkulu ini. Apalagi diketahui, salah satu faktor utama pemicu terjadinya inflasi adalah mahalnya harga beras di pasaran,” ungkap Rai saat pertemuan Tim Komisi XI DPR dengan Pemerintah Provinsi Bengkulu, Bank Indonesia, dan Otoritas Jasa Keuangan di Bengkulu, Jumat (2/2).

Selain itu, masalah lain yang menjadi sorotan Komisi XI yaitu kelancaran komunikasi dan transportasi udara dari dan ke Bengkulu karena masih minimnya jumlah penerbangan. Persoalan ini nantinya akan disampaikan ke pemerintah pusat agar ke depannya dicarikan solusinya.

“Komisi XI akan coba sampaikan ke pihak terkait di pusat, pasalnya diketahui tingginya harga tiket pesawat udara dari dan ke Bengkulu juga menjadi faktor pemicu lajunya inflasi,” lanjut Rai.

Lebih lanjut ia menyatakan, Komisi XI DPR RI juga mendukung tempat-tempat wisata dan lokasi bersejarah yang terdapat di Bengkulu dikelola dengan maksimal agar daya tarik wisatawan meningkat dan tentunya dapat meningkatkan perekonomian Provinsi Bengkulu.

“Bengkulu ini juga bisa jadi destinasi wisata dan sejarah karena di sini pantai dan wisata sejarahnya juga bagus. Maka dari itu perlu ada sinergi masyarakat dengan Pemprov agar ada tempat wisata itu dapat dikelola dengan maksimal untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Bengkulu ini,” terangnya.

Seperti diketahui berdasarkan data dari Bank Indonesia, Provinsi Bengkulu pertumbuhan perekonomiannya melambat dari tahun sebelumnya 2016 yaitu 5,30 persen namun tahun 2017 menjadi 5,06 persen. Pada tahun 2018 ini Bank Indonesia optimis menargetkan mencapai angka 5,1 persen hingga 5,3 persen.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Bengkulu Endang Kurnia Saputra mengapresiasi pertemuan yang mereka lakukan bersama Komisi XI DPR RI, OJK dan Pemprov Bengkulu. “Saya kira ini pertemuan yang sangat efektif dan bisa membawa hasil yang menggembirakan. Kami menyampaikan tantangan yang dihadapi Provinsi Bengkulu ke depannya, banyak sekali dukungan yang Komisi XI yang disampaikan. Mereka juga mengapresiasi upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Bengkulu bersama BI untuk meningkatkan perekonomian kita,” ucap Endang.

Turut serta dalam Kunjungan Spesial Komisi XI ini, Anggota Komisi XI antara lain Indah Kurnia, Eva Kusuma Sundari, Marsiaman Saragih, Syaiful Rasyid, Sumail Abdullah, dan Anarulita Muchtar. ■ *(jay/sc)*



Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Rai Wijaya berdiskusi dengan mitra kerjanya

## Sareh Wiyono Gelar Istighosah

Anggota Komisi II DPR RI Sareh Wiyono menggelar istighosah sebagai ekspresi rasa syukurnya bersama masyarakat Nganjuk, Jawa Timur. Tausiah keagamaan disampaikan pula untuk menyejukkan suasana di tengah kompetisi politik yang meramaikan Kota Nganjuk.



Anggota Komisi II DPR RI Sareh Wiyono menggelar istighosah

Istighosah dan pengajian akbar ini digelar di Alun-alun Berbek, Nganjuk, Jawa Timur, Senin (5/2). Sareh yang

berasal dari daerah pemilihan Nganjuk, menginisiasi acara religius tersebut dengan menghadirkan KH. Ali Masyhuri

Hamid yang memimpin istighosah dan KH. Anwar Zahidd sebagai penyampai tausiah. Sekitar 5000 warga setempat menghadiri istighosah itu.

Sareh sangat mengapresiasi antusiasme masyarakat setempat menghadiri acara ini. Politisi Partai Gerindra ini berharap, pada pemilu 2019 ada penyegaran kepemimpinan nasional dengan sosok baru dari partai yang kini menjadi oposisi pemerintah.

Istighosah dan pengajian akbar merupakan tradisi religius masyarakat Indonesia yang sesungguhnya sangat ideal digelar setiap kali menghadapi tahun politik. Keharmonisan masyarakat, ulama, dan umaro harus terjaga apik di tengah kompetisi politik yang kerap memecah masyarakat berdasarkan warna politiknya.

“Istighosah akbar ini digelar sebagai wujud syukur dan ikhtiar doa dari masyarakat Nganjuk untuk perbaikan nasib bangsa Indonesia ke depan, terutama Indonesia bisa punya pemimpin yang adil dan peduli kepada rakyat,” harap Sareh. Sementara mengomentari kontestasi pilkada Nganjuk sendiri, Sareh mengatakan, semoga pilkada berjalan lancar dan bisa menghasilkan pemimpin daerah yang amanah dan tidak korupsi. ■ (ce)

## NTT Minta DPR Bahas RUU Daerah Kepulauan

Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Frans Lebu Raya mendorong Badan Legislasi DPR RI (Baleg) untuk segera membahas RUU tentang Daerah Kepulauan. Hal tersebut disampaikannya saat pertemuan dengan Tim Kunjungan Kerja Baleg yang dipimpin Anggota Baleg Adang Daradjatun.

Dalam pertemuan tersebut, Adang menyambut baik masukan dari Pemerintah Daerah NTT tersebut. Politisi dari Fraksi PKS ini menyadari, pengelolaan daerah kepulauan tentu berbeda dengan daerah yang mayoritas wilayah administrasinya berupa daratan, seperti Pulau Jawa tentu beda dengan NTT yang terdiri dari banyak pulau dan laut. NTT terdiri dari 1.192 pulau besar maupun kecil dengan luas laut kurang lebih 200 ribu meter persegi.

“Tentang RUU Daerah Kepulauan, tentu beda antara Jawa dengan Daerah Kepulauan seperti NTT atau Maluku. Beda antara dukungan manajemen dan administrasinya dan peralatan. Ini sudah masuk prolegnas. Ini juga sudah dititipkan kepada para anggota di Baleg,” papar Adang di Kantor Gubernur NTT, Kamis (1/2).

Adang menyampaikan, meskipun dia tidak masuk dalam Panitia Khusus RUU Daerah Kepulauan, tapi dia telah



Anggota Baleg DPR RI Adang Daradjatun

Dari aspek geografis, daerah kepulauan memiliki tantangan dan kesulitan tersendiri dalam melakukan pelayanan kemasyarakatan.

Dia menyarankan agar permasalahan ini harus direspon positif dalam perlakuan pemerintah pusat terhadap besaran Dana Alokasi Umum (DAU) yang memadai.

menyampaikan aspirasi dan kebutuhan masyarakat daerah tentang perlunya RUU Daerah Kepulauan ini. Dia juga menyarankan agar pemerintah pusat dalam pembentukan undang-undang selalu memperhatikan kepentingan masyarakat daerah.

“Saat bertemu gubernur dan pemerintah daerah begitu banyak masukan tentang masalah dari daerah. Agar pusat dalam pembentukan undang-undang selalu memperhatikan kepentingan dan kebutuhan daerah,” ungkapnya.

Sementara itu, Gubernur NTT Frans Lebu Raya menyampaikan alasan perlunya pengakuan Provinsi Kepulauan. Menurutnya dari aspek geografis, daerah kepulauan memiliki tantangan dan kesulitan tersendiri dalam melakukan pelayanan kemasyarakatan. Dia menyarankan agar permasalahan ini harus direspon positif dalam perlakuan pemerintah pusat terhadap besaran Dana Alokasi Umum (DAU) yang memadai.

Secara konstitusional, telah ditetapkan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara kepulauan sebagaimana terdapat dalam Pasal 25A UUD 1945, namun belum diikuti dengan penjabaran lebih lanjut di tataran daerah.

“Wilayah Provinsi yang terdiri dari pulau-pulau dengan karakteristik yang tertentu dan berbeda dengan provinsi lainnya, membutuhkan pengakuan yang berbeda,” paparnya. ■(eko/s)

## DPR Apresiasi Jabar Turunkan Angka Kemiskinan

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Achmad Hafiz Tohir memberikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang telah berhasil menurunkan angka kemiskinan.



Wakil Ketua Komisi XI Achmad Hafiz Tohir di dampingi Anggota memberikan cenderamata usai melakukan pertemuan dengan mitra kerja

“Ini menjadi catatan yang saya apresiasi, karena di tempat lain kita saksikan angka kemiskinan bertambah,” katanya, usai pertemuan memimpin pertemuan Tim Komisi XI dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, BI, OJK, dan perbankan. di Kantor Bank Indonesia, Bandung, Jabar, Kamis (1/2).

Hal yang senada disampaikan Anggota Komisi XI Ahmad Najib Qodratullah. Ia memberikan apresiasi atas prestasi kerja Gubernur Jawa Barat yang bisa menurunkan angka kemiskinan, “Kita tidak berbicara besar atau kecilnya, dengan bisa menurunkan saja bagi saya itu luar biasa sulitnya, artinya saya harus secara fair menilai itu prestasi kerja Gubernur,” ungkap Politisi F-PAN itu.

Selanjutnya ia menyampaikan, dari beberapa kali kunjungannya ke Provinsi Jawa Barat, ia melihat daerah ini memiliki kemajuan yang cukup besar berdasarkan dari berbagai laporan yang diterima terutama dari Tim Inflasi Pengendali Daerah. “Bahwa kita melihat pertumbuhan ekonomi yang cukup positif dan kemudian sebaran-sebaran perekonomian yang cukup merata

dan dilihat dari angka di atas rata-rata dibandingkan dengan provinsi lain,” pujiannya

Berdasarkan data BPS Januari 2018 Indeks Harga Konsumen (IHK) Gabungan Jawa Barat yang meliputi 7 kota, yaitu Kota Bogor, Kota Sukabumi, Kota Bandung, Kota Cirebon, Kota Bekasi, Kota Depok dan Kota Tasikmalaya mengalami kenaikan indeks. Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 128,88 di Desember 2017 menjadi 129,94 di Januari 2018 dengan demikian terjadi inflasi sebesar 0,83 persen.

Adapun data penurunan kemiskinan yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) yakni angka kemiskinan berhasil turun 0,08 persen. Dimana jumlah penduduk miskin yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan dibawah garis kemiskinan sama dengan setara Rp 354.679.

Di Provinsi Jawa Barat pada September 2017 sebesar 3,77 juta jiwa (7,83 persen), terjadi penurunan signifikan jika dibandingkan dengan kondisi maret 2017 dan September 2016 yang masing-masing tercatat 4,17 juta jiwa (8,71 persen) dan 4,17 juta jiwa (8,72 persen). ■(rni/s)

# Tingginya Pertumbuhan Ekonomi Sulut tak Diimbangi Penurunan Rasio Gini



Tim Kunjungan Kerja Spesifik Banggar DPR meninjau proyek pembangunan tol Manado-Bitung di Sulut.

Foto: Syfian

Politisi F-PKB itu mengakui, pertumbuhan ekonomi terkadang bisa memberikan efek pada kesenjangan yang tinggi dan kurangnya pemerataan, sehingga rasio gini masih melebar. Namun menurutnya, memberikan pemerataan lebih mudah didorong daripada meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

“Ini menjadi catatan kepada Sulut, agar sektor pertumbuhan ini diarahkan pada pemerataan. Karena memang secara nasional, rasio gini ini harus terus diturunkan. Ini tugas kita bersama,” imbuh Jazilul.

Jazilul menambahkan, pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dilihat dari capaian tiga indikasi, yakni menurunkan angka pengangguran, mengurangi kemiskinan, dan memperkecil jarak rasio gini atau kesenjangan.

“Artinya pertumbuhan ekonomi di Sulut masih ada catatan. Pertumbuhan ekonomi bagus, tapi belum berkualitas secara baik,” tambah politisi asal dapil Jawa Timur itu.

Namun di sisi lain, Jazilul mengakui, pihaknya mengapresiasi capaian pertumbuhan ekonomi Sulut yang lebih tinggi dibanding target nasional. Ia pun mendorong pertumbuhan ekonomi Sulut dapat dijaga. Aparatur yang ada juga harus berkomitmen untuk meningkatkan kapasitasnya, karena faktor sumber daya manusia ini juga penting.

“Kami tentu memberikan apresiasi, sehingga apa yang menjadi Proyek Strategis Nasional di Sulut agar cepat selesai, seperti Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Bitung dan Tol Manado-Bitung harus cepat selesai. Karena ini akan memberikan energi tambahan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Sulut,” harap Jazilul.

Sementara itu, Staf Ahli bidang Pengawasan Perpajakan Kementerian Keuangan Puspita Wulandari mengatakan, faktor pendorong dari pertumbuhan ekonomi adalah belanja pemerintah dan konsumsi masyarakat. Namun, konsumsi memang memiliki dominansi terhadap pertumbuhan ekonomi. Sehingga, untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dengan mendorong kontribusi masyarakat agar semakin meningkat. ■<sup>(g)</sup>

Pertumbuhan Ekonomi Sulawesi Utara pada Triwulan II Tahun 2017 tercatat sebesar 5,80 persen. Bahkan, capaian ini lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,01 persen. Namun, pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tak diimbangi dari penurunan rasio gini. Tercatat, Sulut menduduki rasio gini terburuk ke-8 se-Indonesia atau sebesar 0,394. Sementara rasio gini nasional berada di angka 0,391.

“Pertumbuhan ekonomi yang tinggi itu akan bernilai kurang, kalau rasio gini masih melebar. Karena rasio gini melebar itu artinya pertumbuhan tidak berkualitas. Kita selalu berharap agar semua pertumbuhan itu berkualitas,” tegas Wakil Ketua Badan Anggaran DPR RI Jazilul Fawaid saat menggelar pertemuan dengan jajaran pemerintah di sektor ekonomi dan keuangan di Manado, Sulawesi Utara, Kamis (1/2).

Pihaknya mengapresiasi capaian pertumbuhan ekonomi Sulut yang lebih tinggi dibanding target nasional. Ia pun mendorong pertumbuhan ekonomi Sulut dapat dijaga.



Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon meninjau bencana longsor di Kawasan Riung Gunung, Puncak, Bogor

Foto: Kurni

## Fadli Zon Tinjau Longsor di Puncak

Hujan deras yang kerap terjadi belakangan ini telah menyebabkan bencana tanah longsor di beberapa titik di Kawasan Puncak, Bogor, Jawa Barat. Akibatnya jalur jalan nasional mulai dari Cisarua menuju arah Puncak untuk sementara waktu ditutup, agar dapat dilakukan upaya evakuasi terhadap korban dan pembersihan jalur dari longsor tanah yang terjadi.

Untuk mengetahui situasi dan kondisi di lapangan atas peristiwa tersebut, Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon melakukan tinjauan secara langsung ke beberapa titik longsor, yakni di kawasan Gunung Mas dan kawasan Riung Gunung, Puncak, Bogor, Jawa Barat, Rabu (7/2).

Di lokasi bencana, Fadli berkomunikasi dengan pihak-pihak

berwenang untuk mendapatkan informasi terkini tentang sejauh mana upaya yang telah dilakukan dalam menangani musibah tanah longsor itu.

“Saya berterima kasih kepada semua pihak yang telah terlibat dalam upaya penanganan bencana tanah longsor di Kawasan Puncak ini, baik dari Kepolisian, Kementerian PUPR, Basarnas, dan seluruh instrumen yang

terlibat dalam penanganan bencana,” ucap Fadli.

Politisi F-Gerindra itu meminta agar masyarakat dan para pihak tetap waspada, mengingat kondisi cuaca yang terjadi di sekitar lokasi cukup ekstrem, karena kabut tebal dan hujan deras juga masih terus turun. Selain itu, badan jalan terlapisi oleh tanah merah, hingga aspal menjadi semakin licin dan berbahaya untuk dilalui kendaraan.

“Kebijakan menutup jalur jalan Puncak oleh pihak Kepolisian menjadi langkah yang tepat, yakni agar dapat memudahkan bagi aparat berwenang melakukan upaya penanganan yang harus dilakukan,” ujarnya.

Politisi asal dapil Jawa Barat itu juga mengingatkan supaya rencana pembangunan jalur jalan Puncak II dapat kembali dipertimbangkan untuk direalisasikan, sebagai jalur alternatif bagi pengguna jalan. ■ (dep/sf)



Ketua DPR RI Bambang Soesatyo menerima kunjungan Taman Kanak-Kanak (TK) Anak Bangsa, Jakarta Selatan, di Ruang Abdul Muis, Gedung Nusantara (7/2). *Foto :Jayadi/iw*



Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah di dampingi Anggota Komisi VI Sartono menyambut positif kegiatan Bintang Orator yang diselenggarakan oleh Biro Pemberitaan Parlemen Kesetjanaan DPR RI .*Foto : Azka/iw*



Komisi III DPR RI dipimpin Kahar Muzakir menggelar rapat konsultasi dengan Pimpinan Makamah Agung (MA) M. Hatta Ali di Gedung MA, Jakarta. *Foto: Supardi/iw*